

## Pasar Ampel Boyolali Ditutup 3 Hari

**BOYOLALI (KR)** - Kegiatan jual beli di Pasar Ampel, Boyolali, ditutup sementara selama tiga hari, Rabu-Jumat (15-17/7). Penutupan dilakukan setelah satu pedagang pasar Ampel, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten setempat dinyatakan positif Covid-19. Menurut Camat Ampel, Dwi Sundarto, penutupan pasar selama tiga hari dilakukan setelah ada satu pedagang berinisial Rmn asal Desa Sampetan dinyatakan positif Covid-19. Pasar juga disemprot disinfektan untuk membunuh virus yang ada. "Dengan penyemprotan disinfektan ini maka pasar bisa bersih dari virus penyebab Covid-19," ujar Dwi Sundarto, Rabu (15/7). Selain itu, jajaran terkait juga melakukan rapid test terhadap kontak erat dari Rmn. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada penularan Covid-19. Sekaligus menjamin kondisi aman dan sehat masyarakat lainnya.

Terkait jumlah pedagang di Pasar Ampel, disebutkan bahwa total ada 1.335 pedagang. Terdiri, pedagang toko atau kios sebanyak 90 orang. Pedagang los sebanyak 955 orang, pedagang pasar pagi 250 orang dan pedagang kaki lima 40 orang. iPasar akan dibuka kembali untuk kegiatan perdagangan pada Sabtu (18/7)." kata dia. Dari pantauan wartawan, pintu gerbang pasar dipalangi memakai bambu. Selain itu, dibeban tempat juga dipasang tulisan berisi pengumuman tersebut. (\*-1)-o

## Massa APPK Datangi DPRD Kebumen

**KEBUMEN (KR)** - Massa dari kelompok Aliansi Pembela Pancasila Kebumen (APPK) yang berjumlah ratusan personil, Minggu (12/7), mendatangi DPRD Kebumen. Massa yang merupakan gabungan 17 organisasi masyarakat (ormas) Kebumen tersebut menggelar aksi yang diberi nama Aksi Damai Dan Bermartabat Kebumen Bersatu Tolak RUU HIP. Mereka berkumpul di depan Gedung Haji di Jalan Veteran

Kebumen, kemudian berjalan kaki sekitar 500 meter menuju gedung DPRD Kebumen. Perjalanan massa membawa ratusan poster dan sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Salah satu spanduk yang dibawa massa di antaranya bertuliskan Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila serta Cabut RUU HIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Adapun tulisan poster yang mereka bawa di antaranya berbunyi Inyong Tolak RUU HIP, Pancasila Tanpa Diskon dan Pancasila Sudah Final.

Aksi yang kemudian digelar di depan gedung DPRD Kebumen tersebut dijaga ketat oleh puluhan personil dari Polres Kebumen, di antaranya dengan memblokir dan menutup pintu gerbang DPRD Kebumen. Ketua DPRD Kebumen, Sarimun, dan sejumlah anggota DPRD Kebumen tampak berjejer di depan pintu gerbang untuk menyimak rangkaian aksi yang digelar APPK. Aksi diwarnai dengan rangkaian orasi yang berisi aspirasi APPK terhadap RUU HIP. (Dwi)-o

## Ganjar Pranowo Minta Ponpes Perketat Protokol Kesehatan

**MAGELANG (KR)** - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo minta pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Jateng mengetatkan protokol kesehatan. Gubernur tidak ingin pondok pesantren menjadi salah satu klaster penyebar virus Covid-19. Hal itu disampaikan saat meresmikan gedung SMP Birrul Ummah Tegalgrejo Magelang, Kamis (16/7).

Ganjar Pranowo mengatakan telah melakukan rapat dengan Presiden membahas dua hal, soal Covid-19 dan soal ekonomi. Khusus soal Covid-19 menurut Ganjar, Presiden mengingatkan bahwa belum selesai, sehingga protokol kesehatan harus dilaksanakan secara disiplin. Sudah banyak ponpes yang beraktivitas di Jateng. Sejumlah santri dari

berbagai daerah sudah masuk ke Jateng untuk menuntut ilmu di sejumlah ponpes.

"Saya mendapat pesan dari beberapa anak NU muda di berbagai negara. Intinya mereka minta agar ada upaya pencegahan penularan Covid-19 di ponpes. Mereka tidak rela, Kyai dan Nyai pengasuh ponpes meninggal karena Covid-19," tutur Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo minta seluruh pengasuh pondok pesantren memperketat protokol kesehatan. Santri harus disiplin, termasuk pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan pakai sabun.

Ganjar Pranowo menyempatkan diri melihat proses belajar para santri di Yayasan Birrul Ummah Tegalgrejo. Ganjar Pranowo melihat semua santri tertib memakai

masker dan menjaga jarak antara satu dengan lainnya. "Seperti ini yang kami harapkan, tinggal nanti saat mereka keluar istirahat atau lainnya, tetap diminta disiplin menjaga jarak," ujar Ganjar.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga memberikan bantuan untuk sejumlah lembaga keagamaan sebesar Rp 705 juta. Bantuan itu diberikan kepada yayasan, pondok pesantren, sekolah keagamaan dan lainnya. Salah satu penerima bantuan dari yayasan Birrul Ummah Tegalgrejo, KH Zainul Habib mengatakan, berterimakasih atas perhatian pemerintah terhadap pengembangan pendidikan keagamaan di Magelang. Yayasan Birrul Ummah Tegalgrejo mendapat bantuan Rp 60 juta. Sebelumnya, pihak ya-

hasan juga mendapat bantuan Rp 100 juta yang telah digunakan untuk membantu empat ruang kelas sekolah.

"Kami memiliki SMP berbasis pesantren yang kami dirikan pada 2017 lalu. Al-

hamdulillah dengan gotong royong masyarakat dan bantuan dari pemerintah ini, kami bisa membangun ruang kelas untuk belajar mengajar para santri," ujar Zainul Habib. (Bdi/Tha)-o



KR-Budiono

**Ganjar Pranowo meresmikan gedung SMP Birrul Ummah Tegalgrejo Magelang, sekaligus menyerahkan Bantuan Pembangunan Pendidikan dari APBD Provinsi Jateng.**

## Puluhan Anggota DPRD Ikuti Tes Swab

**GROBOGAN (KR)** - Usai diketahuinya Sekda Grobogan dr Ir HM Sumarno MSI positif Covid-19, sebanyak 50 anggota DPRD setempat, Kamis (16/7) mengikuti tes swab di teras barat Gedung Paripurna I DPRD. Ketika menjalani tes swab, puluhan di antaranya tampak tegang.

"Jika merasa tegang, apakah bisa mempengaruhi hasil tes atau gimana," tanya Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto SSos, kepada salah satu petugas medis, dr Pungki, sesaat sebelum dilakukan tes swab. Oleh dr Pungki dijawab tidak mempengaruhi hasil tes swab. Hanya berpengaruh kurangnya cairan lendir di dalam hidung ketika akan diambil petugas.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto mengatakan, kegiatan tes swab dilakukan sebagai tindak

lanjut setelah Sekda Grobogan yang terkonfirmasi positif Covid-19. Untuk itu, pihaknya harus gerak cepat karena Sekda sempat rapat dengan anggota dewan pada Senin (13/7) siang. "Bagi anggota Dewan yang tidak ikut tes swab, yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Dewan, baik yang dilakukan di Grobogan maupun di luar daerah," tegasnya.

Sehari sebelumnya, Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM bersama Kepala Organisasi Pe-

rangkat Daerah (OPD) setempat juga melakukan hal sama. Mereka diambil sampel spesimen lendir hidung maupun tenggorokan di tenda yang didirikan di depan kantor wakil bupati. Selain uji swab, ada juga pelaksanaan rapid test yang diperuntukkan bagi puluhan ASN di lingkup Setda Grobogan.

Setelah menjalani uji swab, para kepala OPD, Kabag, dan mereka yang sempat berinteraksi langsung dengan Sekda dalam beberapa hari terakhir ju-

ga diminta menjalani isolasi mandiri selama tiga hari. Meski menjalani isolasi, namun para pejabat tetap bekerja dari rumah. "Mereka tetap bekerja seperti biasa. Hanya saja

kerjanya pakai WhatsApp atau video call. Untuk pekerjaan atau urusan administrasi yang tidak terlalu mendesak bisa dipending dulu sementara waktu," ujarnya. (Tas)-o



KR-M Taslim

**Ketua DPRD Grobogan tengah menjalani tes swab di teras barat ruang paripurna I Kantor DPRD.**

# JAWA TENGAH SIAPKAH HADAPI KEKERINGAN?



**MUSIM** kemarau sudah mulai memasuki Jawa Tengah, meski sampai saat ini di provinsi ini masih ada hujan di beberapa daerah. Dengan kondisi tersebut, sebagian masyarakat menyakini kalau kemarau tahun ini sebagai kemarau basah yang setiap saat masih akan diguyur hujan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso kepada KR di Semarang Rabu (15/7). Meski masih terjadi hujan, tetapi di beberapa daerah sudah mulai terlihat kekurangan air terutama untuk kebutuhan pertanian. Di beberapa daerah, keberadaan saluran irigasi nampak sudah tidak mampu mengairi sawah petani, sehingga tidak bisa membantu para petani untuk panen di masa tanam kedua ini.

Menurut Hadi Santoso, kondisi tersebut sebenarnya merupakan fenomena tahunan bagi masyarakat Jawa Tengah. Dari 41 waduk yang dimiliki Jawa Tengah yang terdiri dari sembilan waduk besar dan 32 waduk kecil, setelah memasuki bulan Agustus biasanya ada lima waduk besar dan 19 waduk kecil yang airnya berada dibawah rencana. Ini merupakan data tahunan yang hingga sekarang belum berubah.

Sedangkan untuk kondisi bendung kontrol tiap balai Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) se Jawa Tengah, potensi kekeringan terbesar terlihat di Balai PSDA Bengawan Solo, Lusi, Juwana dan Pemali Comal. Ini artinya kawasan Solo raya, karisidenan Pati dan Pekalongan adalah titik yang sering kekurangan air.

Jika dilihat dari sebaran daerah kekeringan air bersih pada tahun sebelumnya (2019), di bulan September saja tercatat ada 1.259 desa di 360 kecamatan di 22 kabupaten di Jawa Tengah mengalami kekeringan akut. Kondisi tersebut berimplikasi kepada 545.581 kepala keluarga (KK) atau 2,5 Juta jiwa yang terdampak kekeringan.

Menurut Hadi Santoso dari FPKS DPRD Jawa Tengah ini, kondisi kekeringan tersebut sebagian besar berada di kabupaten wonogiri, grobogan,

pati, kebumen, Purbalingga, blora, Rembang, dan Sragen. Jika hujan sudah berhenti selama tiga bulan saja, masyarakat di daerah tersebut sudah harus beli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari melalui jasa pengiriman air tangki.

Untuk memenuhi kebutuhan minum dan masak, masyarakat yang terdampak kekeringan tersebut biasanya harus menjual ternak atau barang lain milik mereka seperti kayu maupun hasil tanam untuk sekedar membeli air untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pemerintah sendiri, dalam menangani kekeringan di sejumlah daerah di Jawa Tengah, menggunakan kebijakan penanganan kekeringan melalui Sistem Pengadaan Air Minum Regional ( SPAM Reg) yang saat ini dibangun di Tegal, Semarang dan Wonogiri.

Meski demikian menurut Hadi Santoso, kebijakan tersebut belum mampu menyelesaikan kekeringan di sejumlah kecamatan yang jadi langganan kekeringan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena dalam pengelolaan SPAM, pemerintah lebih menekankan kepada pendekatan untung rugi.

Hal itu bisa dilihat dari sistem

pengelolaannya yang dilakukan bekerjasama dengan PDAM. Dengan melibatkan PDAM berarti basis perhitungannya bukan lagi butuh atau tidak, tetapi tertutup atau tidak biaya operasional yang dikeluarkan dari kebijakan tersebut.

Dengan demikian, dampak yang timbul adalah wilayah kecamatan yang menjadi langganan kekeringan karena alasan topografi, yaitu jarak yang cukup jauh dari lokasi proyek SPAM tersebut tetap tidak mendapat layanan air bersih, karena jika dilayani pengelola SPAM akan mengalami kerugian.

"Misalnya Wonogiri yang dialiri dari program SPAM WOSOSUKAS, hanya wonogiri kota dan selogiri saja yang mendapat pelayanan SPAM, padahal kekeringan cukup parah yang terjadi setiap memasuki musim kemarau, justru ada di kecamatan Parangupito, sing ngorong Girintontro, Pracimantoro, dan eromoko yang secara topografi ada disebelah atas proyek SPAM tersebut," tutur Hadi Santoso.

Demikian juga dengan kecamatan Sukodono, gesi, tangen, dan Kecamatan jenar Kabupaten Sragen, juga tidak terjangkau oleh proyek SPAM yang menghabiskan dana ratusan Miliar

tersebut, karena proyek menggunakan kalkulasi untung rugi bagi pengelola SPAM.

Hadi mengatakan persoalan kekeringan di sejumlah daerah di Jawa Tengah ini dulu sempat didekati dengan kebijakan pemanfaatan air dalam tanah dengan leading sektornya pihak dinas ESDM. Dinas ESDM memiliki program sumur dalam dan pengangkatan air dalam tanah untuk membantu masyarakat yang kekeringan. Ini bisa dilakukan karena kebijakan pengelolaan air bawah tanah tetap ditangani oleh dinas ESDM.

Namun menurut Hadi Santoso, kewenangan pengelolaan air bawah tanah oleh Dinas ESDM sekarang sudah dicabut, dan dialihkan dari ESDM ke bidang Pekerjaan Umum. Sedangkan Undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumberdaya Air mengamanahkan pengelolaan air bawah tanah menjadi kewenangan dinas PSDA.

Namun di Jawa Tengah, untuk proses pengangkatan tahu 2021 tidak bisa dilaksanakan karena perda nomor 9 tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dalam fungsinya, belum memasukkan urusan air tanah menjadi urusan PSDA.



KR-Budiono

**Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso saat memimpin rombongan Komisi D meninjau bendungan.**